BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Para pelaku dan korban kekerasan bisa mengancam dan terjadi kepada siapa pun, utamanya dalam hal hubungan berpacaran antara seorang pria dan wanita. Afrizal (2024) menyebutkan bahwa pacaran juga dilihat sebagai tahap perkembangan awal masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja adalah calon penerus bangsa yang akan menjadi pelaku pembangunan (Dida dkk., 2019). Kiprah remaja bagi pertumbuhan negara sangat diharapkan untuk mendukung kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Masa remaja merupakan masa peralihan awal masa anak-anak ke dewasa ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis (Jayanti dkk., 2024).

Hidayat (2021) menyampaikan pandangan bahwa tindakan kekerasan ialah tindakan fisik baik di sengaja maupun tidak di sengaja pada bentuk apa pun seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap seseorang yang bisa mengakibatkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan pada bentuk apa pun tidak dibenarkan dan sangat dilarang oleh negara karena semua masyarakat negara, khususnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum, baik itu masyarakatnya atau bahkan pemerintahnya sekalipun. Anwar & Adang (2021) menyampaikan bahwa kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang lain

dalam kelompok pribadi yang intim. Interaksi sosial terjadi pada saat dua orang bertemu, walau hanya bertemu sapa saja tanpa adanya saling menegur, berjabat tangan (Soekanto & Sulistyowati, 2015). Proses tersebut dapat menimbulkan motif untuk melakukan kejahatan, motif, dorongan, sikap, serta pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Suatu kejahatan disebabkan oleh multifaktor yang menyangkut kehidupan natural manusia seperti faktor biologis dan faktor lingkungan sosial (Marlina, 2016). Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia beretika kepada orang lain. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena dengan adanya etika membicarakan penilaian tentang “baik” dan “buruk”, “bagus” dan “tidak bagus” (Kaelan, 2016).

Kekerasan yang bisa dialami oleh seorang perempuan bisa saja berupa kekerasan fisik, psikis, verbal, dan non verbal. Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang berbasis gender, dalam hal kekerasan berbasis gender ini ialah bentukan yang akan menjadi interaksi sosial yang sudah terjadi secara turun-temurun, menyebabkan sistem sosial yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki (Idris, 2017). Budaya patriarki memposisikan status sosial pria lebih tinggi dibandingkan wanita (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Idris (2025) menjelaskan bahwa kesetaraan hukum dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dengan menekankan kebebasan individu dalam memilih jalan hukum tanpa harus dibatasi oleh norma gender tradisional. Hal ini menyampaikan ancaman bagi bangsa dan negara

Indonesia, sebab sudah menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang lumrah yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Tidak heran pada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, lebih banyak menyalahkan sisi perempuan, seperti halnya memakai pakaian yang tidak sesuai norma kesopanan dalam masyarakat. Jufanny & Girsang (2020) menyebutkan bahwa banyak dari laki-laki lebih memilih untuk mengekspresikan emosinya terhadap pasangannya, sementara perempuan hanya lebih bersifat ekspresif semata. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban (Mulyana, 2022).

Definisi korban dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah (Mulyani, 2018) :

1. *"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Pengertian korban dari Arif Gosita merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan menggunakan kepentingan dan hak asasi yang menderita

(Mulyana, 2022). Sedangkan korban diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian dampak perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban berasal dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum ialah pelanggaran terhadap aturan hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap adat-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Salah satu hubungan penting umat manusia adalah ketika seseorang merasakan jatuh cinta kepada orang lain, dan menjalin hubungan intim atau hubungan dengan *intimacy*. Di Indonesia, hal ini sering kali disebut sebagai berpacaran. Pacaran adalah salah satu cara untuk menyatukan dua manusia yang berbeda ke dalam sebuah hubungan, mereka pasti tidak akan pernah mempunyai sama pendapat. Menyatukan dua manusia ialah hal yang tidak mudah, karenanya pada saat menyatakan untuk memiliki hubungan setidaknya dua manusia tersebut sudah siap untuk mendapatkan perbedaan pendapat yang berasal dari pasangannya masing-masing. Pacaran yang sehat artinya pacaran yang saling menguatkan, saling memberikan nasihat yang baik, saling memberikan *support* atau dukungan, saling menyampaikan perhatiannya masing-masing kepada sesama pasangan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi dan sebuah perhatian.

Pacaran sebagai suatu proses antara pria dan wanita untuk saling menjaga serta menghormati hak dan kewajiban.

Pacaran yang sehat ialah pacaran yang melibatkan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, mengasihi, menyayangi dalam tindakan positif serta saling menguntungkan. Pacaran yang sehat atau biasa disebut sebagai *green flag* merupakan suatu kondisi antara pria serta wanita saling menjaga, menghormati satu sama lain, intens berkomunikasi, tidak menyakiti satu sama lain, tidak menghina atau menjelek-jelekan pasangannya, serta saling melengkapi satu sama lain. Pacaran yang sehat ialah hubungan berdasarkan penghormatan terhadap hak akan kebebasan dan martabat yang setara, yang saling menghormati, memberi dukungan, serta memelihara satu sama lain. Pacaran sehat memiliki ciri-ciri yang meliputi rasa kasih sayang, rasa *safety*, kebebasan dalam berpikir dan merasa, saling peduli dan menyayangi, serta menghormati perbedaan pendapat atau pandangan yang ada. Pacaran yang sehat mensyaratkan pula adanya komunikasi yang berkualitas. Bila yang satu bicara, yang lain mendengarkan demikian kebalikannya. Pada kenyataannya tidak seluruh hubungan yang dimiliki manusia adalah hubungan yang sehat (Sagala, 2020). Jika pacaran yang sehat akan didominasi oleh afeksi, rasa saling menghormati, serta penerimaan akan pasangannya sendiri.

Sementara itu, pacaran yang tidak sehat artinya pacaran yang melibatkan laki-laki dan perempuan tanpa memberikan *support*, *feedback*, tidak menghormati pasangannya. Pacaran yang tidak sehat atau yang

selanjutnya disebut sebagai *toxic relationship* merupakan suatu keadaan sosial yang salah satu dari mereka tidak mendukung pasangannya, bahkan hingga membiarkan pasangannya yang membuat pasangannya merasa kesepian sebab tidak didukung oleh pasangannya sendiri. Istilah *toxic relationship* merujuk kepada sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku-perilaku *toxic* atau “beracun”, yang bersifat merusak orang lain hingga mengakibatkan orang tersebut menjadi “seorang korban.” *Toxic relationship* bisa diberikan contohnya seperti hal pasangannya yang sering melakukan kekerasan yang diawali dari ketidaksengajaan untuk melakukan suatu tindakan hingga mengakibatkan luka kepada pasangannya sendiri. Kekerasan dalam berpacaran dapat terjadi pada semua gender, terutama yang sering menjadi korban adalah wanita. Ciri-ciri *toxic relationship* diantaranya adanya kecemburuan yang berlebihan, keegoisan yang berasal dari pasangan, tidak adanya rasa kejujuran antara dua manusia, sikap merendahkan, menyampaikan kritik atau komentar negatif, dan munculnya rasa tidak aman dalam menjalani hubungan (Alfiani, 2020). Seseorang yang merasa bahagia atau berbunga-bunga, belum tentu bisa dirasakan oleh seseorang yang merasakan pacaran tidak sehat.

Seseorang yang merasakan pacarannya tidak sehat bukannya merasa aman dalam menjalin hubungan, alih-alih mereka merasakan tidak nyaman ketika sedang berhadapan dengan kekasihnya sendiri. Mereka yang terkekang oleh *toxic relationship* umumnya mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang suatu hal, bahkan

merasa lelah atau bahkan sampai perlu berbohong hanya sekedar untuk membahagiakannya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak emosi negatif yang dirasakan daripada emosi positif yang menjalani sebuah hubungan. Pengetahuan serta pemahaman mengenai *toxic relationship* diperlukan karena banyak orang yang belum sadar akan pacaran yang tidak sehat yang sedang mereka jalani. Kadang tanpa disadari bahwa hubungan yang tengah dijalani justru menjurus kepada hubungan yang tidak sehat, hingga parahnya lagi ketika tanpa sengaja kita telah melupakan kepentingan kita sendiri.

Kekerasan dalam berpacaran bermula ketika emosi pelaku meningkat, yang membuat pelaku tersebut harus melakukan kekerasan yang ia anggap sebagai hal yang masuk akal dalam hal berpacaran (Ismiati, 2020). Biasanya pelaku kekerasan terhadap pacarnya diawali ketika munculnya rasa ketidakpercayaan pada pasangannya sendiri yang menyebabkan rasa *jealous* atau iri, yang biasanya dalam perdebatan kecil hingga perdebatan besar hingga pelaku kekerasan harus menggunakan tenaganya agar bisa menghukum atau memberikan pembelajaran bahwa ada hal yang tidak pelaku inginkan pada saat itu. “Menghakimi” bukan hanya dapat dilakukan oleh seorang hakim secara formal, akan tetapi setiap orang bisa saja melakukan penghakiman tersebut kepada orang lain tanpa dasar hukum yang jelas (Gultom, 2020a). Wahyuni dkk. (2020) menjelaskan bahwa tindakan pelaku kekerasan dalam melakukan kekerasan terhadap pacarnya, akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan yang berasal dari

pacarnya hingga dapat hilangnya rasa kasih sayang yang dapat diberikan kepada pasangannya masing-masing. Rasa *jealous* yang berlebihan dapat mengakibatkan kesehatan mental pasangannya *down*, hingga bisa berujung pada depresi, sakit fisik, atau bahkan hingga bunuh diri. Parahnya lagi, *toxic relationship* kerap mengikutsertakan manipulasi yang tidak tampak kasat mata, seperti lewat ungkapan yang menjatuhkan secara halus disampaikan.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948, menyatakan sebuah dokumen penting tentang hak asasi manusia yang diakui secara terkenal di seluruh dunia, yang menegaskan bahwa “Setiap orang dilahirkan dengan mempunyai akan kebebasan dan martabat yang setara.” Sederhananya, dalam hal bermartabat, sebagai umat manusia, tidak ada seseorang yang “lebih tinggi” daripada orang lain, setiap orang setara dengan manusia lainnya. Karenanya, tindakan merendahkan orang lain, menyakiti orang lain hingga menganiaya orang lain yang menyebabkan orang lain tersebut menderita, merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Penegasan ini juga artinya simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang pentingnya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, gender, dan jenis kelamin. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa kehadiran orang lain. Akan ada kalanya pada suatu kondisi saat manusia membutuhkan bantuan walau hanya sekadar berinteraksi dengan orang lain. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan dalam

rangka penegakan Hak Asasi Manusia (Ismiati, 2020). Manusia terkadang ingin menguasai manusia yang lain, sehingga menyebabkan benturan hak yang kemudian menimbulkan berbagai kejahatan serta hal buruk yang tidak diinginkan.

Pelaku kekerasan terhadap pacarnya sendiri biasanya memakai alasan bahwa mereka melakukan kekerasan terhadap korbannya adalah karena mereka sayang kepada korban. Pelaku rela menghukum korbannya bahkan hingga membuat luka pada diri korban yang kemudian meninggalkan jejak trauma bahwa korban pernah dikeraskan oleh pacarnya sendiri namun dengan cara yang salah. Laki-laki berperan sebagai kepala keluarga di masa depan, sudah seharusnya mengarahkan keluarganya, utamanya pasangannya ke jalan yang benar. Masri (2021) menjelaskan bahwa pria menjadi pemimpin atas keluarganya, atas diri, dan atas istrinya. Kehadiran laki-laki menyumbangsihkan ketegasan yang dapat diajarkan kepada pasangannya dengan cara yang baik, lemah dan lembut, sementara perempuan memberikan sifat yang penyayang, membina serta mendidik pasangannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa remaja zaman sekarang menentukan untuk memiliki sesosok yang dapat menemani, mendampingi serta menjadi penyemangat dalam hidupnya untuk dapat terus menjalankan hubungan pacaran yang sehat. Setiap manusia pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk saling menjaga satu sama lain antar pasangannya, dengan cara mengarahkan ke jalan yang benar dan memberikan masukan yang dapat

mengembangkan diri dengan pasangannya, terkecuali bagi pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya sendiri, merasa bahwa ia sudah keren karena sudah mendidik pasangannya dengan cara yang benar, namun tidak dimata orang lain. Seorang pelaku yang sudah melakukan suatu kekerasan, ia dengan gampang akan melakukan kekerasan lagi yang berikutnya kepada korbannya. Hal ini tentu saja akan menyebabkan pasangannya merenung dan diam karena salah didikan yang dilakukan oleh pacarnya. Umumnya, alasan utama pelaku *toxic relationship* ialah ia harus memegang kendali atau kekuasaan penuh serta harus memiliki semuanya dalam hubungan tersebut. Ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal dari internal dirinya sendiri, melainkan juga bisa dipengaruhi juga oleh masyarakat melalui budaya, pendidikan, dan tafsir agama. Gultom (2020) menyampaikan bahwa kepentingan pribadi seperti ganti kerugian di nomor dua kan, sedangkan kepentingan umum atau masyarakat diutamakan, seperti penjatuhan sanksi berupa pidana atau pembedaan, karena Hak Asasi Manusia wajib di atas segalanya.

Pelaku kejahatan pembuat korban menambah keagresifannya dengan melibatkan dirinya dalam tindakan yang agresif, sementara korban merupakan insentif negatif bagi si pembuat korban dengan demikian (Mulyana, 2022). Hal ini merupakan efek yang jelas tergambar yang memungkinkan dapat terjadi pada siapa pun. Aurelie (2022) menyatakan bahwa *toxic relationship* menyudutkan salah satu pihak, yaitu pihak

perempuan saja. Mereka tidak memiliki ruang untuk berbicara akan kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Sebagian besar korban kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, menumbuhkan perspektif ketidakpercayaan akan pasangannya sendiri karena apa pun yang korban lakukan pasti akan tetap salah di mata pelaku. Hal ini didasari atas apa yang pelaku inginkan biasanya tidak dapat diberikan oleh pasangannya. Banyak korban merasa kehilangan arah karena laki-laki yang mereka cintai sudah tidak mencintai dan menyayangi mereka sebagaimana mestinya, hingga menumbuhkan rasa trauma yang mendalam bagi korban kekerasan.

Kekerasan dalam hubungan pacaran ini bermula terjadi di Kota Depok pada tahun 2021. Terdapat sepasang kekasih antara laki-laki yang bernama Arie berusia 21 tahun, berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Putri berusia 19 tahun. Arie dan Putri telah melangsungkan hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya. Mereka saling mengenal satu sama lain sejak memasuki dunia perkuliahan, mereka mengawali hubungan pacaran dengan melakukan pendekatan pada saat perkenalan lingkungan kampus. Pada awal hubungannya, Arie dan Putri sama-sama bahagia, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Hubungan keduanya pun selalu harmonis, hingga pada suatu hari Arie berubah tidak seperti biasanya dan Arie mulai melakukan kekerasan fisik dengan cara sering memukul, menendang, menampar, bahkan hingga mencaci maki Putri yang membuat Putri menjadi pribadi yang pendiam dan tidak menceritakan hal tersebut

kepada siapa pun. Arie juga selalu mengancam melalui media sosial kepada Putri apabila Putri tidak ingin mendengarkan penjelasan Arie.

Berdasarkan kejadian di atas, maka Arie telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur di dalam :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama);

1. Pasal 351 ayat (1),

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 335 ayat (1) ke-1,

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

1. Pasal 466 ayat (1),

“Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

2. Pasal 448 ayat (1) huruf a,

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang :

a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1. Pasal 29 *Jo.* Pasal 45B,

Pasal 29,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang beresiko ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.”

Pasal 45B,

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang beresiko ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kasus di atas telah menjelaskan bahwa Arie sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, pengancaman melalui langsung dan media sosial, serta hinaan terhadap Putri, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 351 ayat (1), Pasal 335 ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Pasal 466 ayat (1), Pasal 448 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta Pasal 29 *Jo.* Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

merupakan suatu pelanggaran pidana. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa kasus mengenai hal serupa tidak dapat terulang lagi kepada khalayak umum dikarenakan di Indonesia telah mengatur berbagai hal yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dalam bentuk *Memorandum Hukum* yang berjudul **PENDAPAT HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB ARIE ATAS PERBUATAN PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN PUTRI DALAM *TOXIC RELATIONSHIP*.**